

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KALURAHAN KARANGASEM**

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat Bila Informasi Dibuka	Manfaat Bila Informasi Ditutup
1.	Dokumen kepemilikan tanah (arsip Letter C)	PP Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 34 Ayaat 1	Tidak Terbatas kecuali atas persetujuan yang bersangkutan	Tidak terjaminnya kerahasiaan kepemilikan tanah	Menjamin kerahasiaan data kepemilikan tanah
2.	Data pribadi penduduk	PP Nomor 40 Tahun 2019 Pasal 5. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan	Tidak Terbatas kecuali atas persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi penduduk yang harus dijaga	Melindungi data pribadi Penduduk.
3.	Dokumen Pamong Kalurahan	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak Terbatas kecuali atas persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi pamong kalurahan yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pamong kalurahan yang bersifat rahasia
4.	Biodata elektronik pamong kalurahan dan Warga	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan	Tidak Terbatas kecuali atas persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi pamong kalurahan dan Warga Kalurahan yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pamong kalurahan dan Warga Kalurahan yang bersifat rahasia
5.	Data Rekam Medis	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak Terbatas kecuali atas persetujuan yang bersangkutan	melanggar Privasi sehingga dapat merugikan	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia untuk melindungi keamanan dan kapasitas hukum

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat Bila Informasi Dibuka	Manfaat Bila Informasi Ditutup
6.	Dokumen Pengadaan Barang/jasa	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Pasal 5 huruf b Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan	Terbatas sampai 5 tahun	Terjadi penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa dan persaingan tidak sehat	Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa
7.	Laporan Pelaksanaan anggaran dan Laporan keuangan tahun berjalan (SPJ dan bukti-bukti pengeluaran)	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terbatas sampai 5 tahun	Pemeriksaan oleh Pihak yang tidak memiliki kewenangan pemeriksaan, potensi terjadinya penyalahgunaan	Melindungi dokumen dari penyalahgunaan
8.	Laporan Pelaksanaan anggaran dan Laporan keuangan tahun berjalan (SPJ dan bukti-bukti pengeluaran)	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terbatas sampai selesai 5 tahun	Pemeriksaan oleh Pihak yang tidak memiliki kewenangan pemeriksaan, potensi terjadinya penyalahgunaan	Melindungi dokumen dari penyalahgunaan
9.	Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler/Kasus/Khusus dan tindak Lanjut Rekomendasi Hasil	Pasal 6 ayat 3 huruf d jo Pasal 17 huruf I UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak Terbatas	Menghambat kesuksesan keijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat Bila Informasi Dibuka	Manfaat Bila Informasi Ditutup
10.	Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual	Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak Terbatas	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjamin kerahasiaan pribadi
11.	Dokumen perjanjian kerjasama	Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak Terbatas	Dapat merugikan kepentingan kedua belah pihak	Menjamin kerahasiaan agar tidak terjadi kebocoran yang akan merugikan
12.	Dokumen penyelesaian Sengketa tanah	Pasal 17 huruf a UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak Terbatas	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Dapat memperlancar proses penegakan hukum



KABUPATEN GUNUNG LIRAH,
 LIRAH
 KARANGSARI
 PARIMIN